

**ALIANSI DALAM BALANCING: ANALISIS NORMALISASI  
HUBUNGAN QATAR DENGAN IRAN DITENGAH  
MUNCULNYA PERGESERAN ALIANSI DI TIMUR TENGAH**

***ALLIANCES IN BALANCING: AN ANALYSIS OF QATAR'S  
NORMALIZATION OF RELATIONS WITH IRAN AMIDST THE  
EMERGENCE OF SHIFTING ALLIANCES IN THE MIDDLE  
EAST***

**Rahmania Putri Purwati<sup>1</sup>, Rajaa Yusuf Taufiqulhakim<sup>2</sup>, Rike Alfiana<sup>3</sup>, Siti  
Aisyah<sup>4</sup>, Zaky Ismail<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Email: [rahmaniapp08@gmail.com](mailto:rahmaniapp08@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Email: [rajaayusuf0504@gmail.com](mailto:rajaayusuf0504@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Email: [rikealfiana12@gmail.com](mailto:rikealfiana12@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Email: [aisyaa1207@gmail.com](mailto:aisyaa1207@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Email: [zakyismail@uinsa.ac.id](mailto:zakyismail@uinsa.ac.id)

**Abstrak**

Kebutuhan akan keberpihakan atau aliansi regional antara negara-negara besar dan kecil terus mempengaruhi politik internasional dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini juga telah menimbulkan krisis regional teluk yang sebagian besar telah menjadi aspek yang semakin penting dalam hubungan politik internasional kontemporer. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menginterogasi hubungan Iran-Qatar dan krisis regional Teluk, dengan menggunakan konsep *balance of power* sebagai kerangka analisis, dan data dari sumber sekunder. Tulisan ini berpendapat bahwa meskipun ada blokade ekonomi di Qatar, terdapat peningkatan hubungan antara Qatar dan Iran dan komunikasi yang lebih langsung antara pejabat kedua negara. Namun, artikel ini menyimpulkan bahwa blokade yang dilakukan oleh Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mungkin akan semakin memperkuat hubungan Iran-Qatar dalam jangka panjang melalui kebijakan luar negeri yang diambil oleh Qatar untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Iran. Paper ini merekomendasikan agar Qatar harus terus-menerus memastikan manuver yang tepat antara negara-negara di kawasan Teluk agar Qatar dapat bertahan hidup dan memastikan kepentingan nasionalnya terjamin.

**Kata kunci:** Kebijakan Luar Negeri, GCC, *Balance of Power*

### ***Abstract***

*The need for regional alignments or alliances between large and small states has continued to influence international politics in recent decades. It has also given rise to the Gulf regional crisis which has largely become an increasingly important aspect of contemporary international political relations. The purpose of this article is to interrogate Iran-Qatar relations and the Gulf regional crisis, using the concept of balance of power as an analytical framework, and data from secondary sources. It argues that despite the economic blockade on Qatar, there has been improved relations between Qatar and Iran and more direct communication between officials of the two countries. However, the article concludes that the blockade imposed by the Gulf Cooperation Council (GCC) might further strengthen Iran-Qatar relations in the long run through the foreign policy taken by Qatar to normalise relations with Iran. This paper recommends that Qatar should constantly ensure proper manoeuvring between countries in the Gulf region for Qatar to survive and ensure its national interests are secured*

**Keywords:** Foreign Policy, GCC, Balance of Power

### **PENDAHULUAN**

Negara-negara mengidentifikasi kepentingan dan ancaman bersama yang mereka hadapi. Misalnya ancaman militer, ekonomi, atau politik dari negara lain. Terbentuknya aliansi seringkali bermanifestasi sebagai reaksi terhadap ancaman dari aliansi lain. Misalnya, Pakta Warsawa dibentuk oleh Uni Soviet dan sekutunya pada tahun 1955 sebagai tanggapan terhadap NATO. ( Afifah, 2018). Perimbangan kekuatan antar negara membentuk aliansi untuk menyeimbangkan kekuatan negara atau aliansi yang dominan. Misalnya, Pakta Warsawa dirancang untuk menyeimbangkan kekuatan militer NATO di Eropa. Biasanya, aliansi sering kali didasarkan pada ideologi yang sama. Selama Perang Dingin, NATO terdiri dari negara-negara demokrasi liberal dan Pakta Warsawa terdiri dari negara-negara komunis.

Pembentukan aliansi anti-Iran yang terdiri dari Arab Saudi, Israel, dan negara-negara lain telah secara dramatis mengubah tatanan Timur Tengah. Aliansi tersebut telah berupaya untuk meminta bantuan Amerika Serikat, meyakinkan Presiden Donald Trump bahwa kampanye melawan Teheran hanya akan berhasil jika mereka meminggirkan Qatar. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir awalnya memperoleh izin Trump untuk melakukan hal tersebut selama kunjungannya pada Mei 2017 ke Riyadh, sebelum memberlakukan embargo laut,

darat, dan udara terhadap Qatar. Salah satu tuntutan utama mereka adalah agar Doha mengakhiri hubungannya dengan Teheran. Namun, embargo tersebut bersifat kontraproduktif, meningkatkan pengaruh Iran, semakin mempolarisasi negara-negara Teluk Arab, dan mengganggu stabilitas kawasan (Fraihat, 2018).

Dewan Kerjasama Teluk (GCC) sedang menghadapi krisis yang mengancam keberadaannya. Organisasi ini, yang didirikan pada tahun 1981 dengan tujuan sebagai wadah keamanan untuk menyeimbangkan kekuatan Iran, kini terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Sementara itu, kubu kedua terdiri dari negara-negara yang menolak penggunaan embargo sebagai solusi atas perselisihan internal GCC, yaitu Kuwait, Oman, dan Qatar. Perpecahan ini juga merambah ke dunia Sunni yang lebih luas, dengan Turki mendukung Qatar dan Mesir mendukung Arab Saudi. Sementara itu, negara-negara mayoritas Sunni lainnya seperti Pakistan memilih untuk bersikap netral. Perpecahan ini melemahkan persatuan antara negara-negara Arab dan Sunni yang dibutuhkan Arab Saudi untuk menghadapi Iran (Fraihat, 2018).

Hal ini menjadi bukti bahwa pembentukan dan interaksi antar aliansi mencerminkan dinamika kompleks dalam politik internasional, di mana negara-negara terus-menerus menilai kembali hubungan mereka untuk menjamin keamanan dan kepentingan nasional mereka (Siyamtinah, 2009). Poros Qatar-Turki-Iran berpotensi menjadi penyangga utama bagi apa yang disebut sebagai NATO Arab, yang akan dipimpin oleh Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi tampaknya telah berhasil membuat Pakistan berpihak, tetap saja Pakistan berbagi perbatasan dengan Iran dan sangat bergantung pada Cina, sekutu utama Iran lainnya. Oleh karena itu, sikap anti-Iran Islamabad hanya dapat meluas sejauh ini (Shahtahmasebi, 2019).

Dalam konteks ini, dinamika aliansi di Timur Tengah mengalami pergeseran signifikan. Salah satunya adalah normalisasi hubungan Qatar dengan Iran di tengah munculnya pergeseran aliansi regional. Aliansi-aliansi baru dibentuk untuk menjaga stabilitas dan menghindari dominasi kekuatan tunggal, mengikuti prinsip *balance of power* yang telah lama digunakan dalam kebijakan internasional. Ini bertujuan menjaga kepentingan nasional di tengah dunia yang penuh persaingan

kekuasaan, dengan pencarian kekuasaan sebagai tujuan inheren dari kebijakan luar negeri.

Konsep *balance of power* telah lama menjadi prinsip utama dalam perencanaan kebijakan internasional. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dengan memastikan bahwa tidak ada satu negara yang dapat mendominasi tanpa menimbulkan aliansi dari negara lain yang cukup kuat untuk menyeimbangkan kekuatan tersebut. Rousseau menggambarkan bahwa negara-negara Eropa secara diam-diam membentuk sistem solid yang mencegah dominasi tunggal dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Dan tujuan utama *balance of power* adalah menjaga kepentingan nasional, yaitu pelestarian negara di dunia yang penuh dengan musuh potensial. Dalam sistem ini, negara-negara terus bersaing untuk meningkatkan kekuatan mereka guna mempertahankan posisi dalam tatanan internasional yang kompetitif. *Balance of power* memastikan bahwa setiap negara memiliki motivasi untuk mempertahankan dan memperluas kekuatannya guna menjaga stabilitas dan mencegah hegemoni (Haas, 1953).

Dalam penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam beberapa aspek seperti membantu memahami alasan Qatar melakukan normalisasi hubungan dengan Iran sebagai kebijakan luar negerinya dan bagaimana hal tersebut dapat membantu Qatar bertahan selama krisis diplomasi akibat pemutusan diplomatik oleh negara anggota GCC dengan tuduhan membiayai kelompok teroris.

Penelitian yang relevan, seperti penelitian yang dilakukan Luciano Zaccara yang berjudul "*Qatar and Iran: Regional Roles, Risks and Opportunities*". Salah satu penelitian ini memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Penelitian yang relevan tersebut membantu dalam memahami dampak blokade kuartet terhadap hubungan Iran-Qatar dan prospek hubungannya. Penelitian lainnya dilakukan oleh Triesanto Romulo Simanjuntak, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana yang berjudul "*Balance of Threat Analysis in Resolving the Diplomatic Crisis of Qatar and Saudi Arabia in 2017-2020*", dalam penelitian ini memiliki keterkaitan topik seperti topik penelitian ini. Dalam jurnal tersebut menguraikan upaya Qatar untuk mencapai kebebasan demokratis yang lebih besar dan pendekatan yang lebih moderat terhadap hubungan

internasional mendorong Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya untuk menerapkan blokade diplomatik pada tahun 2017. Menurut Simanjuntak, kebijakan luar negeri Qatar tersebut dinilai fleksibel karena berhasil menavigasi krisis diplomatik dengan menggunakan pendekatan keseimbangan ancaman, sebuah konsep kunci dalam teori Neorealisme yang mengemukakan struktur internasional anarkis yang mengharuskan negara-negara untuk menavigasi panggung politik global untuk bertahan hidup.

Permasalahan penelitian atau rumusan masalah yang muncul dari penelitian ini yaitu (1) apa alasan Qatar melakukan normalisasi hubungan dengan Iran sebagai kebijakan luar negerinya? dan (2) bagaimana kebijakan luar negeri Qatar untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Iran membantu Qatar survive dari blokade negara anggota GCC?

Alternatif solusi yang dipilih dalam penelitian ini adalah menanggapi dengan tegas blokade ekonomi dan politik dengan melakukan kerjasama militer dengan negara tetangga Qatar selain kerjasama di bidang ekonomi, karena pemutusan hubungan diplomatik oleh negara anggota GCC yang dipimpin oleh Saudi Arabia dengan alasan membiayai sekelompok teroris yang ada di Iran tidak hanya berdampak pada melambatnya perkembangan ekonomi negara namun juga menjadi ancaman keamanan. Peneliti menilai normalisasi hubungan Qatar dengan Iran merupakan manuver politik dan alternatif yang logis jika di analisis dengan konsep *balance of power*. Aliansi baru yang dibentuk Qatar dan Iran ini dapat mengurangi dampak blokade dan mengurangi ancaman keamanan serta dapat melindungi kepentingan nasional Qatar agar tidak terlalu dikekang dalam pengambilan keputusan atau kebijakan luar negeri negara tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- 1) Library research (Penelitian kepustakaan), yaitu penggunaan data sekunder yang bersumber dari buku, artikel, majalah, dan berita. Yang telah diolah

menjadi data untuk diklasifikasikan dan disimpulkan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

- 2) Riset media, yaitu proses pengumpulan data tambahan terhadap berbagai pemberitaan di media, baik dari media cetak maupun media online di Internet.
- 3) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan triangulasi waktu. Pendekatan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
- 4) Analisis deskripsi dilakukan dengan menganalisis pergeseran aliansi yang signifikan serta menginvestigasi normalisasi Qatar terhadap Iran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Aliansi Dalam Konteks Timur Tengah**

Arab Saudi dan Turki, sebagai negara mayoritas Sunni, memiliki harapan untuk membentuk sebuah aliansi Sunni yang mampu menyeimbangkan kekuatan Iran yang didominasi oleh Syiah. Namun, upaya ini mengalami hambatan signifikan. Ketika Turki mendukung Qatar dalam menghadapi embargo yang dipimpin oleh Arab Saudi, dan negara-negara Sunni lainnya seperti Kuwait, Maroko, dan Oman tetap netral, peluang untuk membentuk aliansi Sunni semakin menipis. Situasi ini memicu konflik baru dalam komunitas Sunni.

Qatar, yang menghadapi embargo dari Arab Saudi, terpaksa memperkuat hubungan ekonominya dengan Iran sebagai langkah untuk menghindari dampak negatif dari embargo tersebut. Kekhawatiran Qatar semakin meningkat karena ada dugaan bahwa Arab Saudi memiliki ambisi untuk menggulingkan rezim di Doha. Ketegangan juga terlihat antara angkatan udara Emirat dan Qatar. Mengingat Iran memberikan dukungan kepada Qatar saat dibutuhkan, sulit bagi Qatar untuk melepaskan hubungan dengan Iran. Selain itu, Qatar tetap waspada terhadap kemungkinan langkah ekonomi atau militer yang mungkin diambil Arab Saudi di masa depan (Fraihat, 2018).

Pada tahun 2017, Qatar menghadapi embargo yang dilakukan oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Libya. Embargo ini dipicu oleh pandangan bahwa Qatar, dengan ambisi politiknya, mulai menjadi ancaman. Meskipun merupakan negara kecil, Qatar sangat kaya, yang menyebabkan posisinya rentan. Kondisi ini mendorong Qatar untuk mencari berbagai aliansi demi memastikan keamanan dan memperkuat status serta posisi diplomatiknya. Hal ini diungkapkan oleh pakar politik Mehran Kamrava dalam bukunya berjudul Qatar: Small State, Big Politics (Cueto, 2024).

### **Aliansi Baru Qatar-Iran-Turki Di Timur Tengah**

Saat ini, Qatar, Iran, dan Turki telah membentuk aliansi regional yang membuat Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya merasa terganggu. Ironisnya, situasi ini adalah akibat dari tindakan mereka sendiri. Pada Juni 2017, Arab Saudi memimpin koalisi negara-negara yang berusaha menekan Qatar agar tunduk dan menerima sejumlah tuntutan yang tak masuk akal. Namun, bukannya menyerah, Qatar justru menemukan dukungan dari beberapa mitra utama yang siap membantunya menghadapi tekanan tersebut. Mitra-mitra ini kini secara terbuka membentuk aliansi baru, yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah secara signifikan (Shahtahmasebi, 2019).

Aliansi ini telah membentuk dinamika baru di kawasan Timur Tengah, mempengaruhi politik, keamanan, dan ekonomi regional yang terbentuk dari kepentingan bersama dan tantangan yang dihadapi oleh ketiga negara, seperti isolasi politik, konflik regional, dan persaingan dengan kekuatan besar lainnya seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Secara politik, ketiga negara ini memiliki kepentingan untuk mengimbangi dominasi Saudi dan blok negara-negara Teluk lainnya yang dipimpin oleh Saudi. Misalnya, blokade yang dipimpin Saudi terhadap Qatar pada 2017 mendorong Qatar untuk mendekatkan diri ke Iran dan Turki. Iran menyediakan bantuan ekonomi dan akses udara selama blokade, sementara Turki mengirim pasukan untuk mendukung keamanan Qatar. Hal ini memperkuat hubungan trilateral mereka dalam menghadapi tekanan eksternal .

Aliansi antara Qatar, Iran, dan Turki telah menjadi faktor penting dalam dinamika politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah, dengan dampak yang signifikan pada stabilitas regional. Kerjasama ini telah menciptakan ketegangan dengan negara-negara Arab Teluk yang memiliki pandangan politik yang berbeda, memperdalam perpecahan politik di kawasan (Fatunnisa, 2020). Meskipun memperkuat pengaruh Qatar, Iran, dan Turki di kawasan, aliansi ini juga menimbulkan reaksi negatif dari negara-negara sekutu dan mitra dagang tradisional, yang dapat mengakibatkan isolasi diplomatik dan tekanan ekonomi terhadap negara-negara yang terlibat.

Dengan demikian, aliansi Qatar-Iran-Turki memiliki dampak kompleks yang berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah, memperlihatkan dinamika politik yang rumit dan beragam di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, aliansi Qatar-Iran-Turki membawa dampak signifikan pada dinamika kawasan Timur Tengah. Dengan saling mendukung dalam menghadapi tantangan politik, keamanan, dan ekonomi, ketiga negara ini mampu memperkuat posisi mereka dan mengubah peta kekuasaan regional. Namun, aliansi ini juga memicu kekhawatiran dan reaksi dari negara-negara lain di kawasan yang merasa terancam oleh kebangkitan kekuatan baru ini, sehingga menciptakan ketegangan yang berkelanjutan di Timur Tengah.

Pada akhir tahun 2017, ada peningkatan signifikan dalam perdagangan bilateral antara Turki, Iran, dan Pakistan dengan Qatar, memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sejak dimulainya 'krisis Qatar', perdagangan antara Iran dan Qatar bahkan melonjak hingga 117% dalam waktu kurang dari enam bulan. Tindakan ini didukung oleh fakta transportasi darat yang ditandatangani oleh Iran, Qatar, dan Turki pada bulan Agustus tahun tersebut, dimana pakta ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan waktu transit dalam pertukaran barang. Melihat adanya pemblokiran dari Arab Saudi terhadap aliran barang ke Qatar, jelas bahwa perjanjian ini memiliki dampak yang signifikan (Shahtahmasebi, 2019).

Di sisi lain, Qatar juga telah melakukan investasi besar di Turki, dengan total investasi mencapai lebih dari \$20 miliar. Investasi ini, seperti yang dilaporkan oleh Al-Jazeera, merupakan yang tertinggi kedua dalam hal nilai oleh negara mana



pun, menunjukkan pentingnya hubungan antara Qatar dan Turki. Meskipun berada dalam konteks tekanan internasional dan pembatasan ekonomi, ketiga negara tersebut, meskipun memiliki perbedaan geopolitik yang signifikan, berhasil memulai pemulihan hubungan ekonomi mereka.

### **Normalisasi Hubungan Qatar Dengan Iran**

Di luar persepsi luar tentang Iran sebagai negara yang mendukung organisasi teroris, Qatar membuat keputusan strategis dan pragmatis untuk menormalkan hubungan dengan Iran karena sejumlah alasan. Hubungan geografis dan keamanan antara Qatar dan Iran berasal dari akses bersama mereka ke sumber daya gas alam terbesar di dunia, yang dikenal sebagai South Pars (di Iran) dan *North Dome* (di Qatar). Pengembangan dan pengelolaan sumber daya ini bergantung pada kerja sama dengan Iran, dan ladang gas sangat penting bagi perekonomian Qatar. Fungsi ladang gas mungkin telah terancam oleh ketegangan dengan Iran, yang akan merugikan ekonomi Qatar. Dinamika kekuatan di wilayah tersebut Qatar mengalami blokade pada tahun 2017 oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA). (Vatanka 2021).

Iran adalah salah satu negara yang mendukung Qatar selama blokade dengan memasok makanan dan kebutuhan lainnya. Dukungan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan positif dengan Iran untuk mengimbangi dampak blokade yang diberlakukan oleh negara-negara Teluk lainnya. (Mehdi 2022) Qatar dapat mengimbangi pengaruh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dua negara yang kebijakan luar negeri dan sudut pandangnya sering berbenturan dengan kebijakan Qatar sendiri, dengan mengejar kebijakan diplomatik untuk menjaga hubungan positif dengan Iran. Qatar sekarang memiliki kelonggaran yang lebih besar untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang otonom dan terlibat dalam kegiatan diplomatik.

Sejak dimulainya konflik sipil Suriah pada tahun 2011, berbagai sumber menyatakan bahwa Qatar telah menjadi penentang keras pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Dukungan untuk organisasi-organisasi oposisi bersenjata yang berusaha menggulingkan pemerintahan Assad datang dari Qatar. Namun,

negara-negara anggota Liga Arab memutuskan untuk menerima kembali Suriah sebagai anggota pada tahun 2021. Hal ini menyiratkan bahwa perspektif Qatar terhadap rezim Suriah telah berubah (Maharani 2023). Selain itu, Qatar tertarik untuk menjalin hubungan diplomatik dan strategis dengan Iran. Selain meningkatkan keamanan dan stabilitas regional, Qatar berupaya memperkuat hubungannya dengan negara-negara Arab.

Singkatnya, Qatar memutuskan untuk menormalkan hubungan dengan Iran sebagai komponen dari rencana politik yang lebih besar untuk melindungi kepentingannya dan meningkatkan keamanan di wilayah tersebut. Memulihkan hubungan diplomatik, memperluas kepentingan komersial, memperkuat keamanan internal, dan meningkatkan keamanan regional adalah manfaat yang bisa didapatkan Qatar dari normalisasi hubungan dengan Iran.

### **Qatar Memulihkan Hubungan Diplomatiknya Terhadap Iran**

Qatar merupakan salah satu negara di kawasan Teluk yang memiliki hubungan bilateral yang baik dengan negara tetangganya yaitu negara Iran. Hubungan diplomatik antara Qatar dan Iran terjalin erat terutama dalam bidang ekonomi, gas, dan minyak bumi. Sejak 2010 Qatar memiliki kedutaan di Teheran, sementara Iran memiliki kedutaan di Doha hal ini menandakan hubungan baik antara kedua negara telah terjalin.

Namun, pada tahun 2016, hubungan tersebut sempat memburuk ketika terjadi krisis diplomatik di Iran. Insiden ini dipicu oleh serangan sejumlah warga Iran terhadap kedutaan besar Arab Saudi di Teheran. Qatar sebagai salah satu negara yang mengecam serangan tersebut memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada 6 Januari 2016. Qatar kemudian mengalami krisis diplomatik pada 5 Juni 2017 ketika beberapa negara, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan Maladewa, secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan menarik duta besar mereka. Langkah ini membuat Qatar terisolasi secara politik dan ekonomi di kawasan Teluk.

Sebagai respons terhadap isolasi tersebut, Qatar mulai memulihkan hubungan dengan Iran pada Agustus 2017. Iran memberikan bantuan signifikan

kepada Qatar termasuk mengekspor makanan melalui jalur laut dan mengizinkan pesawat Qatar melintasi wilayah udara Iran. Iran juga menyatakan bahwa sanksi ekonomi dan politik terhadap Qatar tidak adil. Presiden Iran menekankan pentingnya dialog regional antara Teheran dan Doha serta memperkuat kerjasama bilateral demi kepentingan bersama kedua negara. Sikap Iran yang mendukung Qatar menghadapi sanksi-sanksi tersebut mendapat apresiasi dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dan pada 23 Agustus 2017 Qatar mengumumkan akan mengembalikan duta besarnya ke Teheran ini menunjukkan kesediaannya untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Iran. (Maharani, 2023)

## **SIMPULAN**

Krisis diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi pada tahun 2017 hingga 2020 memberikan dampak yang signifikan dan tantangan bagi kebijakan luar negeri Qatar, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Qatar berhasil mengatasi krisis ini melalui kebijakan yang cerdas dan strategis, didukung oleh sumber daya yang melimpah dan pendekatan luar negeri yang konsisten. Di bidang pertahanan, Qatar memperkuat kemampuan militernya dengan memodernisasi dan memperluas sistem pertahanan udaranya. Selain itu, Qatar meningkatkan kerja sama militer dengan sekutu utama, termasuk Turki dan Iran untuk memperkuat posisinya melawan blokade dan embargo yang diberlakukan oleh Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya.

Kebijakan luar negeri ekonomi, pertahanan dan keamanan Qatar sepanjang krisis diplomatik dengan Arab Saudi terbukti berhasil. Negara ini telah secara efektif mempertahankan kedaulatannya, memperkuat kemampuan militernya, memperluas jaringan hubungan internasionalnya dan melindungi kepentingan nasional mereka yakni agar tidak dikekang oleh Arab Saudi. Keberhasilan ini menggarisbawahi bahwa, dengan pendekatan kebijakan luar negeri yang strategis dan dukungan sumber daya yang melimpah, negara-negara kecil seperti Qatar dapat secara efektif menavigasi dan mengatasi tantangan geopolitik yang signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, U. (2018). "Aliansi Strategi Untuk Membangun Keunggulan Kompetitif UMKM Pada Sp Aluminium Yogyakarta". Vol 6 No. 3, <https://search.app/v4qzbU5RnH9KQmfUA>.
- Cueto, J. (2024). Apa saja aliansi kekuatan di Timur Tengah yang menjadi sumber ketegangan dan konflik di kawasan ini?, BBC <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c131n1nlez5o>.
- Fatunnisa, H. (2020). Analisis Penguatan Hubungan Qatar-Turki Selama Krisis Teluk 2017. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5165104>.
- Fraihat, I. (2018). "The Middle East's New Battle Lines", [https://ecfr.eu/special/battle\\_lines/qatar\\_flashpoint](https://ecfr.eu/special/battle_lines/qatar_flashpoint).
- Haas, E., B. (1953). "The Balance of Power as a Guide to Policy-Making." The Journal of Politics, Vol. 15, No. 3, pp. 370-398. <http://www.jstor.org/stable/2126103>.
- Maharani, E. (2023), "Qatar Masih Enggan Normalisasi Hubungan dengan Suriah". <https://internasional.republika.co.id/berita/ruby3w335/qatar-masih-enggan-normalisasi-hubungan-dengan-suriah>.
- Mehdi, S., Z. (2022). "Qatar dan Iran mengambil langkah besar menuju perluasan hubungan", <https://www.aa.com.tr/en/economy/qatar-iran-take-big-step-forward-toward-expansion-of-ties/2586340#>.
- Shahtahmasebi, D (2019). "New Turkey-Iran-Qatar axis is rising in Middle East, and it has Saudi Arabia furious", <https://www.rt.com/op-ed/454512-alliance-iran-qatar-turkey-saudi/amp/>.
- Siyamtinah (2009). "Aliansi Strategik: Faktor Pendorong Dan Hambatannya". Vol 45, No. 119, <https://search.app/crdhppE42k1iL6gW6>.
- Vatanka, A. (2021). "The US-Iran-Qatar triangle", <https://www.mei.edu/publications/us-iran-qatar-triangle>.